PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Rudy Habibie¹, Selamat Riadi²

maximillian_al_habibie@yahoo.co.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹
adiriadi67@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹

ABSTRACT

The author made several observations of home industry business actors around houses, roadsides and several other food items and conducted interviews with owners or representatives related to the implementation of the Consumer Protection Law on Labels on Home Industry Food Products.

The objectives of this research are as follows:

- 1. To find out about the implementation of the Consumer Protection Law on labels on household industrial food products.*
- 2. To find out about supervision of household industrial food products as an effort to protect consumers.*

Research result :

- 1. The implementation of the Consumer Protection Law on Labels on Home Industry Food Products, especially in article 8 paragraph (1) point (i) of the Consumer Protection Law regarding violations by home industry food business actors, has not been carried out properly. The results of the findings in the field found that quite a lot of home industry food products violated the label provisions contained in the Consumer Protection Law, especially in article 8 paragraph (1) letter (i) of the Consumer Protection Law, namely home industry food products did not have labels. as well as an explanation of the goods containing the name of the goods, size, net or net weight/content, composition, date of manufacture, date, month, year of expiry, name and address of the business actor. This also violates Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements as well as Decree of the Republic of Indonesia Food and Drug Supervisory Agency Number HK. 00. 05. 5. 1639 concerning Guidelines for Good Panga Production Methods for Home Industries (CPPB-IRT). Apart from that, the level of knowledge and understanding of food labeling regulations is relatively low. They really do not understand their obligations, the aims and objectives of implementing regulations regarding food labels, as well as the impacts that will arise if these regulations are not implemented.*
- 2. The form of supervision over home industry food products as an effort to protect consumers has not been fully implemented properly because the government only applies sanctions in the form of statements to business actors to comply with safety regulations for home industry food products. In this case, efforts to protect consumers have not been running properly because the government is only given the authority to take administrative action as stated in article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 28 of 2004 concerning Food Safety, Quality and Nutrition.*

Keywords: *Consumer Protection, Food, Home Industry*

ABSTRAK

Penulis melakukan beberapa observasi pelaku usaha industri rumah tangga yang ada di sekitaran rumah, pinggiran jalan raya dan beberapa barang-barang makanan lain dan melakukan wawancara kepada pemilik atau perwakilan terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Label pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk pangan industri rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Label Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga khususnya pada pasal 8 ayat (1) butir (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha pangan industri rumah tangga belum berjalan dengan semestinya. Hasil temuan dilapangan menemukan cukup banyak produk pangan industri rumah tangga yang melanggar ketentuan label yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu produk pangan industri rumah tangga tidak memiliki label serta penjelasan tentang barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal bulan tahun kedaluarsa, nama dan alamat pelaku usaha. Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 5. 1639 tentang Pedoman Cara Produksi Panga Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Selain itu tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan label pangan relatif rendah. Mereka benar-benar belum paham akan kewajibannya, maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan mengenai label pangan, serta dampak yang akan timbul apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Bentuk Pengawasan Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pemerintah hanya menerapkan sanksi saja berupa surat pernyataan kepada pelaku usaha supaya mematuhi ketentuan keamanan produk pangan industri rumah tangga. Dalam hal ini upaya perlindungan konsumen belum berjalan dengan semestinya dikarenakan pemerintah hanya diberikan wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pangan, Industri Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Konsumen tidak dapat dipisahkan dari pihak pelaku usaha. Konsumen yang berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan hak-haknya mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen.¹ Sehingga sudah menjadi rahasia

¹ M. Ali Mansyur, 2001: 44-45. Hendra Muttaqin. 2016. *Perlindungan hukum Bagi konsumen Terhadap produk pangan Industri Rumah Tangga di Kota Semarang*. Hal 2. <https://lib.unnes.ac.id/23164/1/8111411281.pdf>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

umum bahwa pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibanding dengan konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukannya seperangkat aturan hukum. Maka dari itu diperlukan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.² Dimana dijelaskan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah. Adapun faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen ialah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Konsumen yang merupakan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen.

Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, sedang ataupun kecil, salah satunya adalah usaha yang berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut P-IRT). Menurut penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Pangan, Pangan Industri Rumah Tangga yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu. Dalam kelangsungan hidupnya konsumen sekarang lebih suka produk makanan cepat saji khususnya produk pangan industri rumah tangga karena harganya lebih terjangkau dipasaran.

Produsen makanan jajanan dalam kemasan sekarang masih banyak yang belum mencantumkan label yang sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut UUPK yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. Hal ini juga melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label yang sesuai pada produk makanannya.

Produk-produk pangan industri rumah tangga tersebut terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai pelabelan yang sesuai dengan standar kesehatan, tentunya produk tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen, karena mereka mengonsumsi produk makanan tanpa mengetahui komposisi, berat/isi bersih, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, dan tanggal kadaluarsanya yang terkandung dalam produk tersebut. Produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel dalam penelitian ini adalah makanan ringan yang dipasarkan di toko-toko maupun pasar tradisional.

Berdasarkan uraian terdahulu, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

² Abdul R. Saliman et al., 2005: 231-232. Hendra Muttaqin. 2016. *Perlindungan hukum Bagi konsumen Terhadap produk pangan Industri Rumah Tangga di Kota Semarang*. Hal 2. <https://lib.unnes.ac.id/23164/1/8111411281.pdf>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

1. Bagaimana implementasi undang-undang perlindungan konsumen terhadap label pada produk pangan industri rumah tangga?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan konsumen?

Adapun tujuan dari deskripsi dan analisis tentang pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk pangan industri rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan konsumen.

Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini :

1. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel dipasaran.
2. Bagi peneliti dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum diskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.³ Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁴

2. Pendekatan penelitian

Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) di dalam penulisan penelitian ini, karena peneliti akan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁵ untuk memperoleh kejelasan pembenaran ilmiah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pengamatan (*observasi*) atau wawancara (*interview*), maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti suatu

³ Cholid Narbuko dan abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Cet VI. PT Bumi Aksara. Jakarta 2005, Ha. 44. <http://repository.radenintan.ac.id/3408/5/BAB%20III%20TESIS.pdf>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

⁴ Irawan Seohartono. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Remaja Rosda Karya. Bandung. 1999, Hal. 63 <http://repository.radenintan.ac.id/3408/5/BAB%20III%20TESIS.pdf>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

⁵ Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.133

penelitian berdasarkan dari penggambaran yang ada dilapangan artinya penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan wawancara terjun langsung ke lapangan.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁶ berupa peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
- 7) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
- 8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifiat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- 9) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makana Nomor: HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan yang bersifat penunjang dari bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah yang membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana lingkungan hidup

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu kamus dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Label Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Pangan Industri Rumah Tangga atau disingkat (P-IRT) termasuk dalam industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang sangat baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan adanya industri rumah tangga yang tersebar secara luas di berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Industri rumah tangga dalam perkembangannya di dukung dari bahan baku yang hampir seluruhnya menggunakan bahan baku yang beredar dan tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dan dikonsumsi oleh masyarakat luas dan memberikan kontribusi perkembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Namun hingga kini masih

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persada., hlm. 13.

banyak pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukan bagi makanan, makanan mengandung pengawet berlebihan, atau perbuatan-perbuatan lain yang sangat merugikan masyarakat luas. Bahkan dapat mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka dalam hal ini penulis melakukan beberapa observasi pelaku usaha industri rumah tangga yang ada di sekitaran rumah, pinggiran jalan raya dan beberapa barang-barang makanan lewat order online shop serta melakukan wawancara kepada pemilik atau perwakilan terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Label pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga.

Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Oyyan (30 tahun), beliau adalah pemilik industri cireng yang beralamat di Komplek Rajawali, gang. 2 jl. Trans Kalimantan, Barito Kuala. Hasil produksi Industri Rumah Tangga ini adalah ‘Cireng’ rasa rujak pedas. Industri Rumah Tangga ini dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yakni beliau sendiri, suami dan dibantu anak. Beliau telah memproduksi cireng rujak pedas ini sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) bulan. Selama beliau memproduksi cireng tersebut beliau tidak pernah mendapati konsumen yang merasa dirugikan akibat dari mengkonsumsi cireng tersebut. Beliau tidak mengetahui mengenai perintah bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label pada produknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang berbunyi “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Oyyan terkait dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pencantuman label. Pada produk cireng yang diproduksi oleh Ibu Oyyan belum mencantumkan label karena masih disibukkan dengan proses produksinya. Cara yang beliau gunakan dalam menjelaskan kepada konsumen atau pembeli dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen adalah dengan cara memberikan penjelasan dan gambaran tentang proses produksinya bahwa bahan-bahan yang digunakan aman dan tidak berbahaya demi kelangsungan hidup. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Oyyan:

“Saya tidak tahu tentang Undang-Undang itu dan saat ini saya belum bisa mendaftarkan produk Saya ke Dinas Kesehatan dan belum mencantumkan label karena saya masih sangat sibuk memproduksi cireng. Akhir-akhir ini juga kami di sibukkan dengan banyaknya pesanan dalam jumlah lumayan banyak sehingga untuk masalah mencantumkan label saya belum ada waktu untuk mengurusnya”. (wawancara dengan Ibu Oyyan, pada hari minggu 21 Juli 2024).⁷

Wawancara kedua ditujukan kepada Ibu Ifah (38 tahun). Hasil industri rumah tangga Beliau adalah “Keripik Singkong” yang berdomisili di Komplek Batola Residen blok L nomor 32 jalur 4, jalan Trans Kalimantan Barito Kuala. Produksi keripik singkong ini dikerjakan 4 (empat) orang yakni beliau sendiri bersama suami dan 2 orang anaknya. Beliau telah menggeluti

⁷ Ibu Oyyan. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Barito Kuala, 21 Juli 2024.

pekerjaan ini selama 1 tahun lamanya. Terkait dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa wajib mencantumkan label, beliau mengatakan bahwa produksi belum mencantumkan label dikarenakan belum mengetahui adanya izin Pangan Industri Rumah Tangga atau disngkat (P-IRT) dari Dinas Kesehatan. Beliau juga merasa adanya kendala-kendala dalam mencantumkan label tersebut. Berikut pernyataan Ibu Ifah dalam wawancara:

“Saya tidak tahu tentang mencantumkan label itu wajib, dan saya tidak mempunyai dana untuk pendaftaran produk saya ini, karena daripada dananya dipergunakan untuk pendaftaran produk ini, lebih baik untuk tambahan modal saya saja kan lumayan”. (wawancara dengan Ibu Ifah, pada hari Senin 22 Juli 2024).⁸

Industri Rumah Tangga sebagai aset perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Definisi tersebut sesuai dengan kondisi fakta dilapangan, dimana setelah penulis melakukan observasi, diketahui bahwa Industri Rumah Tangga Pangan ini menjalankan kegiatan usaha atau produksinya dalam pengolahan pangan dilakukan secara manual oleh tenaga manusia atau semi otomatis dengan peralatan relatif sederhana.

Bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga tersebut kebanyakan adalah pelanggaran terhadap pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tentang pelabelan produk Pangan Industri Rumah Tangga.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi, bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

Selain dalam Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 huruf (i), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 97 dan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No: HK. 00. 05. 5. 1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) menjelaskan pelabelan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), terdapat pula peraturan untuk mencantumkan label yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terdapat pada ayat (2) disebutkan pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan : (1) nama produk; (2) daftar bahan yang digunakan; (3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi; (5) halal bagi yang dipersyaratkan; (6) tanggal dan kode produksi; (7) tanggal, bulan , tahun kedaluwarsa; (8) nomor izin edar bagi pangan olahan; dan (9) asal muatan bahan pangan tertentu.

Hal ini bertujuan agar setiap produksi yang beredar luas di masyarakat atau memasukkan produksi pangan ke wilayah Indonesia agar pangan yang dikemas dan diperdagangkan wajib

⁸ Ibu Ifah. Ibu Rumah Tangga. Wawancara Pribadi. Barito Kuala, 22 Juli 2024.

mencantumkan label pada, di dalam atau kemasan pangan tersebut karena Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sangat menekankan pencantuman label pada suatu produk.

B. Pengawasan Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Keamanan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan hal penting dikarenakan Produk Pangan Industri Rumah Tangga tersebut dibuat dengan alat semi otomatis sehingga ada kemungkinan keamanannya tidak terjamin. Pengawasan keamanan Produk Pangan Industri Rumah Tangga dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan pangan yang aman untuk di konsumsi serta menjamin adanya hak-hak dari konsumen.

Untuk memenuhi tujuan Perlindungan Konsumen sebagaimana yang di maksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukannya pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan konsumen tersebut secara memadai. Pengawasan perlindungan konsumen pertama-tama ditujukan kepada produsen pelaku usaha terlebih dahulu.

Pengawasan terhadap pelaku usaha pada hakikatnya memastikan terselenggaranya dan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pengawasan merupakan unsur yang paling penting dalam terlaksananya perlindungan konsumen. Dengan adanya pengawasan diharapkan pelaku usaha ikut serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan terselenggaranya sarana prasarana produksi yang baik, sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat, pengawasan tersebut dapat meliputi:

- a. Diri pelaku usaha
- b. Sarana dan prasarana produksi
- c. Iklim usaha secara keseluruhan
- d. Konsumen

Dalam penelitian ini, pelaku usaha senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya. Pengawasan ini sangat perlu dikarenakan kecenderungan adanya kesempatan orang untuk tidak memenuhi kewajibannya dipandang ada pada setiap orang. Oleh karena itu, pengawasan ini merupakan tindakan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesempatan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Inilah yang disebut dengan pengawasan preventif, dengan mempertinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap sebuah peraturan hukum.

Pemerintah berindak sebagai pengayom masyarakat juga sebagai pengawas dan pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang di berikan adalah dengan di keluarkannya undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah lainnya, serta penerbitan Standar Mutu Barang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan serta standar-standar yang telah ada.

Dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcemen*) perlindungan konsumen, dalam peredaran produk pangan industri rumah tangga, perlu adanya alat negara yang

melaksanakannya. Menurut pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Masyarakat; dan
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pemerintah di sini dimaksudkan adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ikut serta berpaeran aktif terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan kota setempat supaya lebih aktif lagi agar perlindungan konsumen lebih terlindungi.

Adapun dari ketentuan asal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dikehui yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah pemerintah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pejabat yang diberi tugas tersebut harus dilengkapi surat perintah untuk menghindari timbulnya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau dalam kata lain oleh pemeriksaan dari pihak yang tidak berwenang. Apabila adanya di duga terdapat tindak pidana dalam bidang pangan termasuk produk industri rumah tangga dapat dilakukan tindakan penyidikan oleh petugas penyidik sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, yaitu pegawai BPOM (Basan Pengawas Obat dan Makanan) yang diberi kewenangan oleh penyidik.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan diatas, pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada pasa 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan berupa:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dai kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin.

Selain itu terdapat pula pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berupa:

- a. Memberi peringatan secara tertulis;
- b. Larangan mengedarkan produk pangan tersebut untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran jika pangan sudah diedarkan;
- c. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- f. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Apabila sanksi administratif tidak bisa memberikan efek jera maka sanksi pidana dapat dikenakan, terdapat dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah).

Dengan demikian pelaku usaha akan bertingkah laku sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Didalam unsur pembinaannya yaitu pemerintah membantu pelaku usaha sebisa mungkin memenuhi kewajibannya supaya tangguh dalam berusaha agar tercipta iklim usaha yang sehat serta tumbuhnya hubungan yang sehat pula anatara sesama pelaku usaha dan konsumen. Kemudian melalui pengawasan ini dapat tercapainya kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha. Sedangkan, pengawasan konsumen melalui pembinaan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen agar mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional.

KESIMPULAN

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Label Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga khususnya pada pasal 8 ayat (1) butir (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha pangan industri rumah tangga belum berjalan dengan semestinya. Hasil temuan dilapangan menemukan cukup banyak produk pangan industri rumah tangga yang melanggar ketentuan label yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu produk pangan industri rumah tangga tidak memiliki label serta penjelasan tentang barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal bulan tahun kedaluarsa, nama dan alamat pelaku usaha. Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 5. 1639 tentang Pedoman Cara Produksi Panga Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Selain itu tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan label pangan relatif rendah. Mereka benar-benar belum paham akan kewajibannya, maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan mengenai label pangan, serta dampak yang akan timbul apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Bentuk Pengawasan Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pemerintah hanya menerapkan sanksi saja berupa surat pernyataan kepada pelaku usaha supaya mematuhi ketentuan keamanan produk pangan industri rumah tangga. Dalam hal ini upaya perlindungan kosumen belum berjalan dengan semestinya dikarenakan pemerintah hanya diberikan wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Sadar. Taufik Makarao. Dkk. *Hukum Perlindungan konsumen Di Indonesia*. 2012. Jakarta. Akademia.
- Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. 2008. Jakarta. Visimedia.
- Gunawan Widjaja. Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. 2000. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. 2010. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Asram A.T Jadda. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di kabupaten Enrekang. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/338/293>. Diakses pada 24 desember 2020.
- Isnaini Annisa Ulul Azmi. 2018. *Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Industri Rumah Tangga*. <http://eprints.ums.ac.id/63171/9/NASPUB.pdf> . Diakses pada 29 Desember 2020.
- Kimbal.R.W. 2015. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil : Sebuah Studi kualitatif*. Yogyakarta, Penerbit Depublis. Hal 27. <http://eprints.umm.ac.id>. Diakses tanggal 3 Januari 2021.
- Riski Ananda. 2016. *Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gabang)*. Riau.Hal.10. <http://eprints.umm.ac.id>. Diakses tanggal 3 Januari 2021.
- Daud Sajo. Hal 2. klasifikasi industry. <https://www.scribd.com/document/343788171/Pengertian-Industri-Dan-Klasifikasi-Industri>, Diakses tanggal 3 Januari 2021.
- Wiwit Arif Wijaya dan Winiati P. Rahayu, 2014, “Pemenuhan Regulasi Perlabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor”, Jurnal Mutu Pangan Vol. 1(1): 65-73 URL: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69583>, Diakses 3 Januari 2021.
- Ni Made Sellia, Ida Bagus Putra Atmadja. UNUD. *Tentang Izin Pada Indsutri Rumah Tangga Pangan* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/Kajian>, Diakses pada tanggal 3 Januari 2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK 00. 05. 5. 1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK. 03. 1. 23. 04. 12. 2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK. 03. 1. 5. 12. 11. 09955 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.